Analisis Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pameungpeuk Garut

Putri Regina Wijaya, Siska Lis Sulistiani*, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

putrireginawijaya836@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, anahimaya24@gmail.com

Abstract. The aim of this research is to analyze the management of the waqf land according to Islamic Law and to evaluate it in the context of Law No. 41 of 2004 on waqf, particularly regarding the management of waqf land. The research uses a qualitative method with a descriptive-normative approach. Primary and secondary data were collected through interviews, documentation, and literature studies, and were analyzed using descriptive qualitative data analysis methods. The findings indicate that the management of waqf land in Pameungpeuk Village, according to Islamic Law, meets most of the essential requirements, but there are some aspects that are considered invalid. Specifically, in terms of the distribution, the mawqūf 'alayh (beneficiary) is not trustworthy, as the land that was supposed to be used as a burial site is instead being used as a parking lot by the nadzir, generating personal profit. Furthermore, the waqf deed exists only in oral form and lacks formal documentation, relying solely on trust. The waqif wishes to reclaim the waqf land, but the nadzir refuses, resulting in a dispute over the management of the waqf. The waqif and nadzir are unable to reach an agreement regarding the use of the waqf property, and while the waqif is considering further action, the family has suggested mediation first. According to Law No. 41 of 2004 on waqf, the nadzir, as the manager of the waqf land, has failed to fulfill his duties as prescribed in Article 4, Article 5, Article 11, Article 12, and Article 44 (1) and (2), as he did not properly manage the waqf land according to the law

Keywords: *Waqf, Islamic Law, Nadzir*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis menurut Hukum Islam tentang wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf dan menganalisis menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu pengelolaan tanah wakaf yang berada di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, menurut Hukum Islam rukun sudah sah dipenuhi semua tetapi ada beberapa unsur yang dianggap belum sah, yaitu didalam aspek penyaluran yaitu mauqūf alaih tidak amanah seharusnya diterima oleh masyarakat adalah kuburan tetapi dijadikan lahan parkir oleh pihak nadzhir dan menghasilkan keuntungan untuk pribadi dan tidak adanya bukti akta ikrar hanya melalui lisan atas dasar kepercayaan, wakif ingin mengembalikan tanah wakaf tersebut, namun Nadzhir menolak untuk dikembalikannya tanah wakaf maka terjadilah masalah pengelolaan antara wakif dengan nadzhir dimana wakif dan nadzhir tidak saling sepakat dalam peruntukan harta wakaf lalu wakif ingin bertindak lebih jauh dengan adanya kasus ini tetapi dari pihak keluarga wakif menyarankan adanya mediasi terlebih dahulu. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Nadzhir sebagai pengelola tanah wakaf tersebut tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 44 ayat 1 dan 2.

Kata Kunci: *Wakaf, Hukum Islam, Nadzhir*

A. Pendahuluan

Di dalam islam sangat di anjurkan untuk bersedekah kepada sesama manusia karena salah satu amalan yang dapat menyelamatkan kita setelah kita meninggal dunia ialah amalan jariyah (amal terus –menerus). Amal jariyah dapat diperoleh dari sedekat jariyah yaitu dengan berwakaf. Wakaf sendiri merupakan menyedekahkan menyedekahkan kemaslahatan umat sehingga hal ini akan menjadi pahala jariyah kepada orang yang menyedekahkan hartanya.

Pada dasarnya tanah-tanah atau benda lain yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan atau diwariskan. Hal ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar ra, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُ نَبِيَّ بِهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُؤْتَى رِثًا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibn Umar, bahwa Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di Khaibar. Kemudian mendatangi Rasulullah untuk konsultasi tentang tanah tersebut. Umar berkata: "wahai Rasul, saya mempunyai sebidang tanah di Khaibar yang berisikan harta yang belum pernah saya miliki selama hidup saya. Lantas, bagaimana menurut Anda?" Rasul menjawab: "Jika kamu berkenan, silakan dirawat pokok (bibit)nya, dan bersedekah dari buah pohon tersebut." Kemudian Ibn Umar berkata bahwa Umar bin Khattab melakukan sebagaimana saran Rasul, yaitu bersedekah dengan buah pohonnya, bibitnya tidak dijual, tidak pula dibagi-bagikan, serta tidak diwariskan. Ia menyedekahkannya ke orang-orang fakir, para kerabatnya, para budak, para pejuang di jalan Allah, para ibn sabil, serta tamu. (HR. Bukhari).

Syarah dari hadist tersebut menjelaskan bagaimana Umar bin Khattab r.a. mengelola tanah yang diperoleh di Khaibar. Ia ingin memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menahan pokok harta (tanah) dan bersedekah dari hasilnya, Umar r.a. mengamalkan konsep wakaf. Ini menunjukkan bahwa wakaf adalah cara untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, di mana hasil dari harta tersebut digunakan untuk membantu orang lain. Pokok dari harta wakaf tidak boleh dijual, dihadiahkan, atau diwariskan, ini adalah ciri khas wakaf, di mana harta tetap utuh dan hanya hasilnya yang boleh dimanfaatkan untuk kebaikan.

Harta wakaf diperuntukkan bagi golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, kerabat, budak, dan di jalan Allah (seperti pembangunan masjid, pendidikan, dan kesehatan). Ini menunjukkan bahwa wakaf berfungsi sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan sosial. Orang yang mengelola wakaf diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dengan cara yang baik, misalnya menggunakan hasil tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau memberi makan teman. Namun, pengelolaan ini harus dilakukan dengan niat yang tulus dan bukan untuk keuntungan pribadi. Hadis ini memberikan penjelasan tentang fleksibilitas dalam pengelolaan harta wakaf. Selama pengelolaan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tujuan wakaf, tidak ada larangan bagi pengelola untuk memanfaatkan hasilnya(2)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis ini menekankan pentingnya wakaf sebagai sarana amal jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan memahami konsep wakaf dan ketentuannya, kita diingatkan untuk berinvestasi dalam harta yang dapat memberikan kebaikan bagi orang lain, sehingga pahala kita akan terus mengalir meskipun kita telah tiada(3)

Menurut Pasal 11 Undang - Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwasanya Nadzhir itu mempunyai tugas sebagai berikut diantaranya adalah :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Menurut Pasal 12 Undang - Undang No 41 tahun 2004, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Menurut Pasal 13 Undang - Undang No 41 tahun 2004, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Bedasarkan penjelasan di atas jika di kaitkan dengan pengelolaan tanah wakaf yang ditemukan di Jl. Bitung Sumaer Kampung Pasampeu Rt.02 Rw. 10 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Garut dengan luas tanah kurang lebih 500 meter² dimana tanah wakaf yang diberikan oleh Wakif kepada Nadzhir tujuan dijadikan tanah kuburan pada tahun 2022 namun Nadzhir menjadikannya lahan parkir yang kepentingannya tidak sesuai dengan Ikrar Wakaf dan hasil dari lahan parkir tersebut digunakan untuk kepentingan nadzhir, karena tidak sesuai ikrar wakaf maka Wakif ingin mengambil kembali tanah wakaf tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ikrar wakaf dan disamping itu tidak adanya bukti akta ikrar wakaf tanah milik keluarganya karena wakif dan nadzhir melakukan ikrar wakaf secara lisan.²

Pihak Nadzhir menolak mengembalikan tanah wakaf kepada Wakif karena kepentingan pribadi, Nadzhir yang ditugaskan untuk mengelola tanah wakaf salah memanfaatkan harta wakaf yang seharusnya untuk tanah kuburan digunakan untuk lahan parkir dan hasilnya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Deskriptif normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam masyarakat atau sistem, dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini terfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan norma-norma, aturan, atau pedoman yang diikuti. Metode yang umumnya digunakan dalam penelitian deskriptif normatif mencakup pengumpulan data melalui studi literatur, pengamatan, wawancara, atau penggunaan dokumen-dokumen yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Letak geografis aset wakaf yang dilakukan penelitian ini berada di Jalan Bitung Sumaer Kampung Pasampeu RT. 02 RW. 10 Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Garut dengan luas tanah kurang lebih 500 meter kubik (-+500m²) yang letaknya ada pinggir jalan sebelum masuk perkampungan dalam dan di sebelahnya ada pabrik beras yang masih beroperasi. Keadaan tanah ini agak bergelombang dan tidak merata datarannya. *Wakif* berniat untuk menjadikan tanah ini sebagai tanah wakaf untuk digunakan sebagai makam bagi warga kampung tersebut, dikarenakan *wakif* berada di luar kota dan tanah tersebut dititipkan kepada salah satu keluarganya sebelum itu, tanah sudah diwakafkan kepada pihak *nadzhir* untuk dijadikan makam namun oleh beliau dijadikan lahan parkir guna menguntungkan bagi dirinya. Terkait dengan kondisi sosiologis tanah ini terletak di perkampungan dan yang diketahui dari keluarga *wakif* bahwa warga sekitar sangatlah ramah dan terbuka, bahkan ada beberapa warga yang mengetahui bahwa tanah tersebut digunakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di terapkan oleh *nadzhir*. Karena mereka tidak enak hati dan tidak ingin ikut campur pada akhirnya warga setempat menerima dan tidak peduli bagaimana tanah itu dikelola.

Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pameungpeuk Garut

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzhir (penjaga wakaf) maupun berupa badan pengelola. Maka dari itu ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf dalam Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah.

Hukum wakaf bersifat sunnah atau suatu anjuran bagi umat Islam, sunnah merupakan segala perbuatan, taqirir, perjalanan hidup, dan perkataan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum dan sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Dalam Al-Qur'an, konsep wakaf secara eksplisit tidak disebutkan dengan istilah "wakaf" seperti yang dipahami dalam praktik fiqh Islam saat ini. Namun, prinsip-prinsip yang mendasari wakaf dapat ditemukan dalam ayat-ayat yang membahas

tentang sedekah, amal jariyah, dan penggunaan harta untuk kepentingan umum atau ibadah.

Secara umum, prinsip-prinsip wakaf dapat diturunkan dari pemahaman ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah dan penggunaan harta untuk kepentingan umum, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperinci cara-cara pelaksanaan wakaf. Hadis-hadis ini sering kali digunakan sebagai referensi utama dalam memahami dan menerapkan konsep wakaf dalam praktik fiqh Islam. Pada dasarnya tanah-tanah atau benda lain yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan atau diwariskan. Hal ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar ra, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بَحْبِيزَ أَرْضِ أَثَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُ نَبِيَّ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتِ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibn Umar, bahwa Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di Khaibar. Kemudian mendatangi Rasulullah untuk konsultasi tentang tanah tersebut. Umar berkata: "wahai Rasul, saya mempunyai sebidang tanah di Khaibar yang berisikan harta yang belum pernah saya miliki selama hidup saya. Lantas, bagaimana menurut Anda?" Rasul menjawab: "Jika kamu berkenan, silakan dirawat pokok (bibit)nya, dan bersedekah dari buah pohon tersebut." Kemudian Ibn Umar berkata bahwa Umar bin Khattab melakukan sebagaimana saran Rasul, yaitu bersedekah dengan buah pohonnya, bibitnya tidak dijual, tidak pula dibagi-bagikan, serta tidak diwariskan. Ia menyedekahkannya ke orang-orang fakir, para kerabatnya, para budak, para pejuang di jalan Allah, para ibn sabil, serta tamu. (HR. Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar jelaslah bahwa wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang disyariatkan. Wakaf menjadi sah dan mengikat jika telah diikrarkan atau dilakukan suatu tindakan oleh Wakif yang menunjukkan adanya wakaf tanpa harus menunggu pernyataan menerima (qabul) dari pihak Nadhzir. Apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, maka tidak boleh dibatalkan atau diambil kembali, baik oleh Wakif maupun orang lain. Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapapun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya.

Demikian pula apabila Wakif meninggal dunia maka wakaf tersebut tidak boleh diwariskan. Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (Nadzir), wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang yang berwakaf serta mempergunakan sebagaimana mestinya, dengan bertaat kepada Allah dan berusaha memperbanyak faedah dari barang wakaf itu.

Adapun rukun syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang nadzir menurut Syarat Mauquf^{alaih} (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf). dalam pengelolaan harta wakaf, Mauquf^{alaih} harus memenuhi syarat adil dan mengerti atau mampu. Para Imam mazhab sepakat pentingnya Mauquf^{alaih} atau Nazhir memenuhi syarat adil dan mampu atau mengerti. Menurut Jumhur ulama maksud "adil" adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjahui segala yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan maksud "mampu" ialah kekuatan dan kemampuan atau pengetahuan seseorang mengharuskan apa yang dijaga (dikelolanya).

Dalam menyerahkan tanah wakaf maka manfaat dari harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yaitu menyalurkan manfaatnya pada sektor- sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menyalurkan manfaat dari harta benda wakaf dalam sektor-sektor kebajikan antara lain, yaitu untuk tempat peribadatan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang sosial.

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari :

1. Benda tidak bergerak, tanah, bangunan.
2. Benda bergerak: kendaraan, uang, logam mulia.

Semuanya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan pengelolaan tanah wakaf di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, rukunnya sudah sah dipenuhi semua tetapi ada beberapa unsur yang dianggap belum terpenuhi, didalam

aspek penyaluran yaitu mauquf alaih tidak amanah atau salah seharusnya diterima oleh Masyarakat adalah kuburan tetapi dijadikan lahan parkir oleh pihak Nadzhir dan menghasilkan keuntungan untuk pribadi bukan untuk masyarakat dan tidak adanya bukti akta ikrar hanya melalui lisan atas dasar kepercayaan.

Analisis Undang – Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pameungpeuk Garut

Hubungan hukum antara Wakif dan Nadzir dengan objek tanah wakaf yang terletak di Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut diatur dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat dilihat dari bunyi pasal dan penjelasannya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan pengertian wakaf yaitu : “Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan dijelaskan juga ketentuan umum dibawah ini:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2 menyebutkan Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, dan Pasal 3 menyebutkan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Pada dasarnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang - undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai pengembangan ketentuan dari ketentuan yang telah ada, yaitu :

1. Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), seperti yang terdapat di penjelasan atas Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagian 1 umum menyebutkan bahwa wakaf didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Undang Undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam rangka melindungi harta benda wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi termasuk benda-benda bergerak seperti perlengkapan kantor, kendaraan, uang, logam mulia, surat berharga, kekayaan intelektual, hak sewa, hak menemptati, dan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi lainnya.
3. Peruntukan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Dengan kata lain, peruntukan wakaf diarahkan untuk dikembangkan dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat yang optimal.
4. Peruntukan wakaf yang dinyatakan oleh Wakif dan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak terbatas pada wakaf khairi, tetapi juga wakaf ahli, karena termasuk memajukan kesejahteraan umum walaupun dalam lingkup kerabat yang didasarkan pada hubungan darah atau nasab dengan Wakif.
5. Persyaratan Nadzhir harus terdiri dari orang-orang mampu, terpercaya (amanah) dan profesional di bidangnya dinyatakan oleh Undang-Undang makin tegas, dengan tujuan untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.
6. Undang-Undang juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Selanjutnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena Undang-Undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak. Dengan Undang-Undang wakaf yang baru ini wakaf tersebut tidak lagi terbatas pada tanah milik saja.

Begitu pula dengan jangka waktu pemanfaatan wakaf, Undang-Undang baru ini membenarkan pemanfaatan wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun sebaiknya penyerahan

wakaf itu adalah untuk selamanya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diharapkan, pengembangan wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sesuai dalam Pasal 4 yang menyebutkan Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan Pasal 5 menyebutkan Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Unsur wakaf berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdiri dari a) Wakif; b) Nadzhir; c) Harta Benda Wakaf; d) Ikrar Wakaf; e) Peruntukan harta benda wakaf; f) Jangka waktu wakaf.

Berdasarkan Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;

Pasal 12 menyebutkan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Didalam kasus pengelolaan tanah wakaf yang berada di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, bahwasanya Nadzhir tidak menaati pasal 12 dikarenakan Nadzhir memperoleh semua bagian dari tanah wakaf bahkan memanfaatkannya sebagai lahan parkir. Adapun tujuan dan fungsi wakaf termasuk didalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 berbunyi bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan Pasal 5 berbunyi bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian sesuai bunyi pasal 4 dan pasal 5, bahwa tujuan dan fungsi wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Oleh sebab itu, adanya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai pedoman peraturan dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun harta benda wakaf bergerak dengan maksud agar wakaf tersebut menjadi wakaf yang produktif untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang tujuan dan fungsi wakaf menurut undang - undang jika dilihat dari kasus yang ada di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut bahwa pihak Nadzhir bersalah dikarenakan Nadzhir tidak menerapkan tujuan dan fungsi wakaf dengan benar yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik segi ekonomi, budaya ataupun keagamaan melainkan Nadzhir memanfaatkannya untuk kebutuhan pribadinya. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi benda wakaf, ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan wakaf juga harus memenuhi rukun dan syaratnya agar suatu saat tidak menimbulkan kesalahan dalam mengelolanya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 6 dijelaskan wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf, yaitu adanya Wakif, Nadzhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk adanya wakaf tanah milik harus dipenuhi beberapa rukun dan syarat, yaitu:

- (a) adanya orang yang berwakaf (Wakif), sebagai subjek hukum wakaf tanah milik;
- (b) adanya benda yang diwakafkan (mauquf), yaitu tanah milik;
- (c) adanya penerima wakaf (Nadzhir);
- (d) adanya 'aqad atau lafalz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan Wakif kepada orang atau tempat berwakaf (Mauquf alaih).

Tanah wakaf di desa pameungpeuk ini belum terdaftar di PPAIW sehingga tidak ada Nadzhir yang mengelola tanah wakaf secara khusus, hanya melalui lisan dari pihak Wakif dan menyebabkan orang yang belum paham tentang pengelolaan dan peruntukan harta benda wakaf memanfaatkannya sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengelolaannya. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata

untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.

Walaupun tidak memiliki Ikrar wakaf yang didaftarkan ke PPAIW, wakaf antara Wakif dan Nadzhir tetaplah sah karena sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004. Maka langkah yang perlu dilakukan Wakif dan Nadzhir adalah membuat Akta Ikrar wakaf ke PPAIW untuk menghindari kesalahpahaman tujuan dan fungsi wakaf serta dapat dibimbing pelaksanaan wakafnya oleh lembaga yang berkompeten.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 44 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia

2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dan perubahan inipun dilakukan jika tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun yang terjadi di desa pameungpeuk tanpa menghilangkan fungsi utama yaitu sebagai pemakaman tetapi tanah tersebut dikelola sebagai lahan parkir dan ini juga belum mendapat persetujuan dari beberapa warga yang ada di desa tersebut bahkan dari pihak wakif pun tidak tahu bahwa lahannya tidak dipergunakan dengan fungsinya. Nadzhir harus meminta izin kepada seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut, karena tanah ini diwakafkan untuk masyarakat umum yang ada di desa Pameungpeuk bukan untuk keperluan pribadinya. Jika tanah tersebut sudah terdaftar di PPAIW nadzhir juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada Badan Wakaf Indonesia melalui PPAIW setempat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan tanah tersebut. Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 juga menjelaskan bahwa untuk hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut Nadzhir (pengelola) dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. dan sisanya digunakan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan dan kesejahteraan masyarakat umum di desa tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan tanah wakaf di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut menurut Hukum Islam rukunnya sudah terpenuhi tetapi, didalam aspek penyaluran yaitu Mauquf alaih tidak amanah seharusnya diterima oleh masyarakat adalah kuburan tetapi dijadikan lahan parkir oleh pihak Nadzhir dan menghasilkan keuntungan untuk pribadi bukan untuk masyarakat karena tidak sesuai tujuan ikrar wakaf maka Wakif ingin mengembalikan tanah wakaf tersebut, kemudian tidak adanya bukti akta ikrar wakaf tanah karna Wakif berwakaf hanya melalui lisan atas dasar kepercayaan. Adapun langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah pengelolaan ini menurut hukum Islam adalah memberikan tuntunan bagi para pihak yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai dan bermusyawarah untuk mufakat. Nadzhir menolak untuk mengembalikannya tanah wakaf tanpa akta ikrar wakaf, maka terjadilah masalah pengelolaan antara wakif dengan Nadzhir dimana Wakif dan Nadzhir tidak saling sepakat dalam peruntukan harta wakaf. Wakif ingin bertindak lebih jauh dengan adanya kasus ini tetapi dari pihak keluarga Wakif menyarankan adanya mediasi terlebih dahulu. Dari hasil wawancara nadzhir pun meminta menyelesaikan masalah ini secara baik - baik dan ingin diberi keringanan untuk tanah tersebut yang akan dijadikan kembali lahan parkir untuk kepentingan pribadinya.
2. Menurut Analisis Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut, Nadzhir sebagai pengelola tanah wakaf tersebut tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 44 ayat 1 dan 2 Pasal 4, Nadzhir tidak memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Pasal 5, Nadzhir tidak mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Pasal 11,

Nadzhir tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam Pasal 11. Pasal 12, Nadzhir mengambil keuntungan seluruhnya yang dimana seharusnya hanya 10%. Pasal 44 Nadzhir mengubah peruntukan harta benda wakaf dan tidak adanya atas dasar izin tertulis.

Ucapan Terimakasih

Terima Kasih kepada pembimbing, Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani M.Ag.,M.E.Sy, dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy.,M.H, serta pihak dari Nadzhir maupun Wakif dan semua pihak yang terlibat membantu dalam penelitian ini, semoga senantiasa diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Adriani DP, Agus Putra PA. Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Feb 14;1(2):120–6.
- Aini, Quratul, ‘Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat’, *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2016)
- Ali mustofa, Mus ‘Implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Studi Pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Amaliah, Siti Nurul, and E mulya Syamsul, ‘Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.2 (2022)
- Anshori, Abdul Ghofur, Malilinda Eka Yuniza, and Sugiyarto AZ, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Ariani, Nora Elsha, ‘Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam’ (IAIN Padangsidimpuan, 2017)
- Fauzia, Amelia, Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian, *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, 2016)
- Hakim, Lukman, ‘Merubah Peruntukan Wakaf Dalam Perspektif Empat Madzhab’, *Jurnal Al-Risalah*, 2015
- Hasil Wawancara Dengan Ibu A Selaku *Wakif* Di Jl. Sarimadu Permai Sukajadi Sabtu 30 Maret 2004, 2004
- Hendrawati, Dewi, and Islamiyati Islamiyati, ‘Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah’, *MasalahMasalah Hukum*, 47.1 (2018).
- Horkheimer, and others, ‘Scholar (11)’, *Why We Need the Journal of InteractiveAdvertising*, 2004.
- Hidayat, Ahmad, ‘Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.01 (2016).

- Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin, 'Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11.2(2020).
- Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, Arif Rijal Anshori. Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2023 Dec 22;105–12.
- Inayah, Jahrotul, 'Praktik pengelolaan hasil penjualan tanah wakaf oleh nazhir (Studi Kasus Pembebasan Lahan Jalan Tol Cimaci Di Desa Nagrak)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Islam, Indonesia. Direktorat Jenderal Bimas, and Urusan Haji, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)*
- Islam, *Kompilasi Hukum, 'Buku III Hukum Perwakafan'*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2002
- Jamaludin, Jamaludin, 'Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 2.1 (2019), 63– 84
- Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18.02 (2017), 205–19
- Jubaedah, Jubaedah, 'Dasar Hukum Wakaf, Tazkiyya: *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18.02 (2017), 255–70
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)* (CV. Pustaka Setia, 2010).
- Kurniawan, Rega Nurfasis, 'Analisis Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Implementasi dan tanggung jawab Nazhir dimushola Tanwirul Huda Desa Joorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi' (IAIN Ponorogo, 2021)
- Mahfudz, Asep, 'Analisis Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Keabsahan Wakaf Tanpa Sighat Wakaf' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)
- Makarim, Abdussami, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga
- Mubaroki, Adib, 'Konversi Wakaf Di DKI Jakarta Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Ponpes Daarul Rahman Dan Masjid Hidayatul Musyawaroh)' (Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Mursyid, Khairul, 'Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang', Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2019
- Nissa, Choirun, 'Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf', *Tazkiyya: Nomor, Peraturan Pemerintah, 'Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik', Peraturan Pemerintah Nomor, 24 (28AD)*

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7. <2

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 7.>

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 11
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 32 Ayat (4)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42Tahun2006PP.HTM>

Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, Neng Dewi Himayasari. Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 2022 Dec 21;121–8.